

ABSTRAK

Bahwa latar belakang penulisan Tesis ini adalah untuk membahas tentang penjatuhan pidana bersyarat oleh hakim terhadap tindak pidana korupsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap perkara tindak pidana korupsi yang sudah mengatur batasan pidana minimal khusus.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal (yuridis normatif), yaitu penelitian terhadap norma-norma hukum pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan pidana Indonesia. Hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa penjatuhan pidana bersyarat dalam tindak pidana korupsi bertentangan dengan undang-undang, kemudian yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap tindak pidana korupsi adalah demi terciptanya keadilan, baik bagi terdakwa maupun masyarakat.

Hasil Penelitian ini adalah putusan pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung dalam perkara tindak pidana korupsi bukan merupakan yurisprudensi yang diikuti oleh peradilan-peradilan di bawahnya dan sampai saat ini belum ada satu pun putusan berupa pidana bersyarat dalam tindak pidana korupsi yang ditetapkan menjadi suatu yurisprudensi.

Kata kunci : Pidana bersyarat, tindak pidana korupsi, yurisprudensi.

ABSTRACT

That the background of writing this thesis is to discuss the imposition of conditional punishment by judges against corruption. The purpose of this study was to determine the judge's considerations in imposing conditional sentences.

This research uses doctrinal research methods (juridical normative), namely research on criminal law norms contained in Indonesian criminal legislation. The results of the study concluded that the imposition of conditional criminal acts of corruption is contrary to the law, then the judge's consideration in imposing a conditional sentence on corruption is for the sake of creating justice, both for the defendant and the community.

The conclusion is that the conditional criminal decision handed down by the Supreme Court in the case of a criminal act of corruption is not a jurisprudence followed by the lower courts and until now there has not been a single decision in the form of a conditional sentence in a corruption crime that has been established as a jurisprudence.

Keywords: conditional punishment, corruption, jurisprudence.